

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap Rencana Perangkat Daerah (SOPD), terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, Perangkat Daerah (SOPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) SOPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Pembuatan Renstra Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini mengacu pada visi, misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala sangat penting bagi Kecamatan Tabunganen, maka penyusunan Renstra Kecamatan Tabunganen dilakukan secara partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun **Tujuan** dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini adalah :

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Renstra Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 diformulasikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, sistematika penyusunan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TABUNGANEN

Bab ini mengulas mengenai gambaran umum kondisi Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dari aspek geografi dan demografi, dan kondisi umum SOPD Kecamatan Tabunganen.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Membahas Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis yang merupakan salah satu bagian penting dalam dokumen Renstra dan juga menjadi dasar penentuan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menyajikan butir-butir penting dari permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan statement atau cita-cita pembangunan 5 (lima) tahun mendatang yang dikemas dalam kalimat Visi Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan cara mencapai visi tersebut dalam kalimat Misi dilanjutkan dengan tujuan, sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini, diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi kerja Kecamatan Tabunganen.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target kinerja, penanggung jawab berdasarkan bidang urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis 2012 – 2017, dan Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Indikator Kinerja tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan dan Indikator Kinerja Kecamatan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat statemen akhir yang berisikan harapan-harapan dari pimpinan SOPD dalam melaksanakan dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan yang telah menjadidasar hukum kuat dan legal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TABUNGANEN

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi Kecamatan

1. Tupoksi Kecamatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa: **Tugas pokok Kecamatan** adalah melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, **kecamatan mempunyai fungsi**, yaitu :

1. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
6. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
7. Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
8. Penyelenggaraan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerjanya
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
12. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga
13. Pelaksanaan Koordinasi Keluarga Berencana.

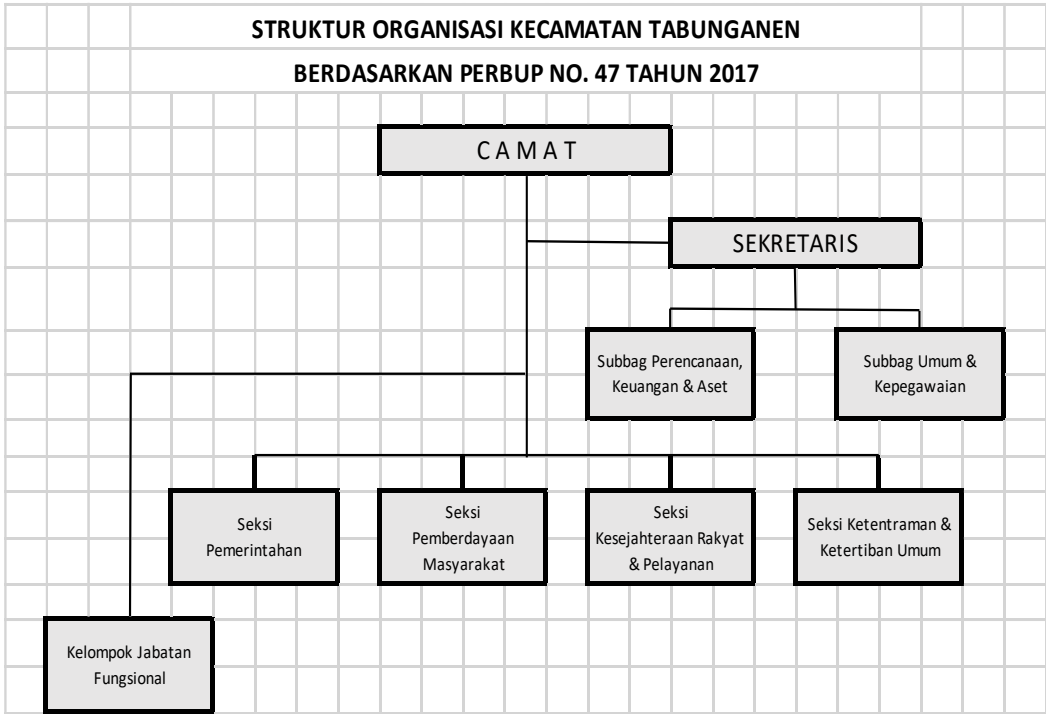
Tugas-Tugas dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ walikota.
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- Tugas Kecamatan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- Tugas Kecamatan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
 - Tugas Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, meliputi:
 - a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Tabunganen

2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Kecamatan Tabunganen, sebanyak 19 (Delapan belas) orang.

Pengklasifikasian berdasarkan Golongan :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 7 orang
- Golongan II : 8 orang
- Golongan I : -
- Tenaga Nonpegawai : 2 orang

Pengklasifikasian berdasarkan jabatan/eselon :

- Eselon III A : 1 orang
- Eselon IV : 3 orang

Penklasifikasian berdasarkan pendidikan :

- S.2 : 1 orang
- S.1 : 5 orang
- D.3 / Sarmud : 2 orang
- SLTA : 10 orang

- SLTP& SD : - : -

Tabel 2.3
Data Pegawai Kantor Kecamatan Tabunganen

NO.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN
1.	Khairani, S.AP., MA.	19650710 198703 1 020	IV / b	Camat
2.	H. Ajimansyah	19620715 198602 1 007	III / d	Sekretaris
3.	Akhmad Husaini, SE.	19751201 200701 1 016	III / d	Kasi Kesra & Pelayanan
4.	Mimi Mariani, S.Sos.	19680424 200604 2 012	III / c	Kasubbag Umpeg
5.	Salidah, S.Sos.	19760812 199903 2 007	III / a	Pengadministrasi Umum
6.	Siti Hafsah, S.Sos.	19850201 201503 2 001	III / a	Analisis Program/ Perencanaan
7.	Asriyani, S.Sos.	19760310 200103 1 001	III / a	Pengadministrasi Umum
8.	Abdul Gapur, A.Md.	19831109 201001 1 016	III / a	Verifikator Keuangan
9.	Muhammad Toni, A.Md.	19800126 200904 1 003	II / d	Pranata Komputer
10.	Abrani	19670121 200701 1 018	II / c	Pengadministrasi Kepegawaian
11.	Rita Jaya	19701018 200701 1 020	II / c	Pengadministrasi Umum
12.	Hanafi	19690513 200701 1 036	II / c	Pengolah Data Pemerintahan
13.	Asbullah	19650714 200701 1 019	II / c	Pengadministrasi Pemerintahan
14.	Hasbi Rahmani	19740110 200902 1 002	II / c	Pengolah Data Perangkat Kec.
15.	Noor Jani	19751007 200906 1 001	II / c	Pengolah Data Kesra
16.	Ahmani	19731107 200701 1 019	II / b	Pengolah Data Pembdy. Masy.
17.	Suparjo	THL	-	Petugas Kebersihan
18.	Sidik Susanto	THL	-	Petugas Jaga Malam

2.2. Sumber daya perangkat daerah

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tabunganen. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran.

2.3. Kinerja pelayanan perangkat daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Tabunganen berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2012-2017 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel

Tabel. 2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan kecamatan tabunganen Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C 23

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi (IKU)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2.	Persentase desa dengan administrasi desa dengan baik			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

Kinerja Kecamatan Tabunganen memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala yang meliputi :

1. Pelayanan Perizinan meliputi:
 - a. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
 - b. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan meliputi:
 - a. Pelayanan KTP,
 - b. Surat Pindah Antar Desa , Antar Kecamatan,
 - c. Rekomendasi Surat Tidak mampu,
 - d. Surat dispensasi Nikah,
 - e. Rekomendasi pencairan ADD dan DD,
 - f. Register Surat Tanah.
 - g. Surat Keterangan Usaha
 - h. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Keberhasilan kabupaten barito kuala dalam menjalankan visi dan misi rpjmd 2017 – 2012 tentunya sangat didukung oleh kecamatan tabunganen agar dapat memberikan suatu perwujudan yang menyeluruh dalam membangun kabupaten barito kuala sebagai daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain. Salah satunya dengan melakukan kegiatan bedah kampung di desa kuala lupak sehingga masyarakat di sana mendapat sentuhan langsung fasilitas pembangunan baik fisik, sarana dan prasarana serta bidang kesehatan yang kesemua itu dapat mendorong ekonomi masyarakat dapat tumbuh dalam rangka mendorong kesejahteraan penduduk desa kuala lupak itu sendiri

Tabel. 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala

TABEL T-C 24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kinerja Utama 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tabunganen Kinerja utama 2 Meningkatkan sinergi pemerintahan kecamatan dan desa melalui pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan terhadap desa di kecamatan tabunganen	58.512.525	72.329.025	86.675.000	95.053.800	72.300.000	57.407.500	65.164.025	86.675.000	95.053.800	72.300.000	98,11	90,09	100	100	100	13.787.475	5,38 %
					12.302.500					12.302.500					100		
	58.512.525	72.329.025	86.675.000	95.053.800	84.602.500	57.407.500	65.164.025	86.675.000	95.053.800	84.602.500	98,11	90,09	100	100	100	13.787.475	5,38 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan hal /objek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Tabunganen dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

- a. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
- d. Kerjasama antar wilayah antar daerah.

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Tabunganen, yaitu :

- a) Kecamatan Tabunganen berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
- b) Kecamatan Tabunganen berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 14 (Empat belas) desa di Kecamatan Tabunganen.
- c) Di Kecamatan Tabunganen telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok budidaya lebah madu, kelompok budidaya kepiting, kelompok-kelompok usaha kecil dengan manajemen usaha yang masih tradisional, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relatif kurang berhubungan dengan investor dari luar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisa isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karenanya, isu-isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tabunganen dalam menjalankan pemerintahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah, belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan tunjangan pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait dengan pengajuan yang rumit. Bahkan dana operasional Kecamatan pun terpaksa dipangkas karena adanya pengurangan anggaran.

Selain itu, belum adanya standar operasional prosedur (sop) pelayanan di tingkat kecamatan, kekosongan jabatan, job description pegawai yang belum tertata, gedung bangunan kantor sebagai sarpras yang kurang memadai, menjadi 'pr' penting kecamatan tabunganen disamping tuntutan prima dalam pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.

b. Bidang Pemerintahan

Kurangnya personil tenaga operasional pelayanan e-KTP dan KK di Kantor Kecamatan Tabunganen, karena petugas operator hanya 1 (satu) orang yang menangani cetak KK, Pengantar KK dan KTP (Barcode), pengantar Akta Lahir, sehingga kinerja pelayanan masyarakat kurang maksimal.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan pemerataan pembangunan wilayah Desa, menjadi isu yang sangat menarik. Pasalnya, setiap tahun diadakan kegiatan musrenbang Kecamatan, pembangunan prioritas telah ditetapkan, namun fakta dilapangan, rencana pembangunan yang diusulkan bertahun-tahun bahkan disetujui menjadi prioritas pembangunan di tingkat Kabupaten, terpaksa mengalah lantaran isu pemotongan anggaran di Kabupaten, pada akhirnya kegiatan Musrenbang hanya sebagai rutinitas tanpa keberpihakan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi acuh terhadap perencanaan pembangunan.

Selain itu, Desa Kuala Lupak yang berada di wilayah Kecamatan Tabunganen dan terletak di ujung selatan wilayah Kabupaten Barito Kuala, saat ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Karenanya diharapkan perhatian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang tidak hanya dirasakan masyarakat Desa Kuala Lupak, melainkan juga masyarakat di

Desa sekitar Desa Kuala Lupak.

d. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Kinerja Kecamatan yang identik dengan pelayanan, menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan dan aparat Kecamatan Tabunganen, karenanya sebisa mungkin pelayanan kepada masyarakat dinomorsatukan, sehingga masyarakat yang berurusan ke kecamatan Tabunganen merasa puas dan senang. Hanya saja, keterbatasan SDM, sedikit banyak mempengaruhi kinerja dan pelayanan Kecamatan.

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa dan Linmas yang adabelum berjalan secara maksimalserta kurangnya sarana dan prasarana Kantibmas di Kantor Kecamatan Tabunganen kabupaten Barito Kuala.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 VISI

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah :

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola fikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemimpin menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajat dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.

4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola fikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola fikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang “BAHALAP” yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

1.1. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
- 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
- 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
- 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) **Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kot**

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) **Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat

harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlakul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku

program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan “*e-Planning and e-Budgeting*“, *e-DataBase*” serta “*e-Evaluating*”.Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

Tabel 3.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD 2017 – 2022 Kab. Barito Kuala

tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Kinerja						
VISI :“TERWUJUDNYABARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)”									
Misi I. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandiri-an Desa dan Penataan Kota									
Tujuan 1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persentase areal kawasan kumuh	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Persentase panjang jalan kondisi baik						
			2. Persentase luas wilayah irigasi kondisi baik						
			3. Persentase lingkungan permukiman kumuh						
			4. Cakupan layanan telekomunikasi						
			5. Persentase backlog						
			6. Luasan RTH public						
			7. Persentase penduduk berakses air minum						
			8. Persentase rumah tinggal bersanitasi						
	Indeks Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan	9. Indeks Kualitas Lingkungan						
Misi II. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian									
Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	Pertumbuh-an ekonomi	Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	10. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan terhadap PDRB						
			11. Indeks Gini						
		Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	12. PDRB per kapita						
			13. Persentase peningkatan PAD pajak dan retribusi daerah						

			14. Persentase pertumbuhan investasi							
Misi III. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia										
Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	15. Angka Harapan Sekolah							
			16. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)							
			17. Persentase lulusan SD khatam Al-Qur'an							
			18. Usia Harapan Hidup (UHH)							
		Meningkat-nya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	19. Persentase organisasi pemuda berwirausaha							
			20. Jumlah perolehan medali bidang olah raga							
			21. Situs cagar budaya yang dilestarikan							
			22. Indeks Kota Layah Anak (KLA)							
			23. Angka Kelahiran Kasar							
			24. Tingkat pengangguran							

1.	1.		25. Tingkat pengangguran							
			26. Tingkat kemiskinan							
Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani										
Tujuan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.	Opini BPK	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	27. Persentase perencanaan pembangunan Peranhtkat Daerah yang sesuai dengan RPJMD							
			28. Indeks Reformasi Birokrasi							
			29. Indeks Kepuasan Masyarakat							

3.3. Telaahan Renstra K/L

Strategis pada dasarnya adalah upaya-upaya sistematis dari analisis yang rasional bagaimana sasaran strategis dicapai dengan efektif dan efisien.Strategi menjabarkan langkah-langkah mencapai visi dan misi melalui program-program indikatif yang sesuai dengan kebijakan umum.Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan strategi untuk mencapai tujuan.

STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN :

“SA”, SATU SINERGITAS USAHA BERDAYA SAING YANG DITUMBUHKEMBANGKAN MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS PERTANIAN INOVATIF.

Sasaran 1.

Terwujudnya peningkatan intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin berdaya saing, yang diindikasikan bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi tawar produk dan mandiri lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya.

Strategi :

Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi

Sasaran 2.

Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang semakin ke hilir yang diindikasikan bertambahnya luas lahan usaha, ragam diversifikasi, produksi, posisi tawar komoditas yang bernilai tambah, yang mendukung kemampuan berketahanan pangan.

Strategi :

- a. Mewujudkan pertanian berkelanjutan
- b. Mewujudkan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dan kelautan
- c. Mendorong peningkatan produktivitas peternakan yang unggul dan berkualitas.
- d. Mewujudkan pemanfaatan hasil hutan rakyat secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas
- e. Mengoptimalkan sumberdaya alam

**“MA”, MASYARAKAT CERDAS, SEHAT DAN BERTAQWA YANG DIWUJUDKAN DENGAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA.**

Sasaran 3.

Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang profesional, terjangkau, merata dan berkualitas yang diindikasikan kompetensi masyarakat yang semakin beriman, bertaqwa, unggul, mampu bersaing dan memiliki semangat untuk berubah lebih baik

Strategi :

- a. Peningkatan Akses Pendidikan
- b. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- c. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sasaran 4.

Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudah, murah, merata serta memadai yang diindikasikan semakin mampu, berdaya dan mandiri masyarakat dalam berpola hidup bersih dan sehat.

Strategi :

- a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
- b. Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

**“RA”, RASA AMAN DAN ADIL, YANG DIPENUHI DENGAN PENYELENGGARAAN TATA
PEMERINTAHAN DAN PENCIPTAAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL YANG BAIK.**

Sasaran 5.

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil.

Strategi :

- a. Penyelenggaraan tertib pengadministrasian kependudukan
- b. Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
- c. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- d. Pembinaan kesadaran kehidupan berpolitik yang demokratis
- e. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- f. Pemantapan reformasi birokrasi
- g. Peningkatan layanan kepada masyarakat
- h. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai dan upaya pemerataan pegawai daerah
- i. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
- j. Penguatan kompetensi pemerintahan desa
- k. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat di bidang hukum
- l. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
- m. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- n. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan informasi
- o. Meningkatkan manajemen data dan informasi pembangunan daerah
- p. Peningkatan pengelolaan pertanahan

Sasaran 6.

Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat, berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan martabat masyarakat semakin baik, memiliki keberdayaan, kebanggaan sehingga mampu mendukung terbentuknya rasa cinta tanah air dan hidup dalam lingkungan keluarga bahagia.

Strategi :

- a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang cacat.
- b. Peningkatan kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak.
- c. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana dan Bina Keluarga Balita
- d. Meningkatkan kebudayaan dan kesenian serta mempromosikan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan serta kepeloporan pemuda
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan olahraga
- g. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan
- h. Memasarkan obyek wisata
- i. Peningkatan pengembangan transmigrasi

“SA”, SARANA DAN PRASARANA WILAYAH YANG DITINGKATKAN MELALUI PERBAIKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PEMBANGUNANNYA.

Sasaran 7.

Terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan lainnya yang diindikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana wilayah, berupa jalan dan jembatan, yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

Strategi :

Peningkatan jumlah jalan dan jembatan dengan kondisi baik

Pembangunan moda transportasi umum

Sasaran 8.

Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat, memadai yang diindikasikan semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan permukiman, perumahan beserta ruang lingkungan yang mendukungnya.

- a. Pemenuhan kebutuhan air bersih
- b. Pengelolaan sistem sanitasi yang baik.
- c. Pemantauan kondisi lingkungan
- d. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam kepemilikan rumah sederhana dan sehat.
- e. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

a. Kawasan Pertanian

Posisi Kecamatan Tabunganen yang berada dipesisir muara sungai Barito yang dilewati anak-anak sungai kecil berdampak positif pada kesuburan lahan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Tabunganen bekerja pada pertanian lahan sawah. Namun, karena kondisi geografis Kecamatan Tabunganen yang juga dekat dengan Laut Jawa, membuat air pasang surut laut masuk, sehingga saat musim kemarau air laut yang asin bercampur dengan air sungai yang membuat tanah kering dan tanaman mati.

b. Kawasan Tambak Ikan

Kecamatan Tabunganen yang berbatasan dengan laut Jawa, juga sangat potensial untuk pengembangan tambak ikan dan pengolahan hasil laut. Hanya saja, kondisi ini masih dikembangkan perorang yang memiliki modal dan sarana transportasi menuju lokasi yang masih sulit dijangkau, membuat potensi ini belum dapat digali secara optimal.

c. Kawasan Wisata

Kecamatan Tabunganen memiliki hutan bakau di pesisir desa Kuala Lupak dan juga mempunyai Pulau ditengah-tengah sungai Barito, yakni Pulau Kaget yang merupakan populasi bekantan. Kondisi ini, jika dikelola dengan baik serta dibuatkan sarana transportasi yang memadai dan pemeliharaan yang terkoordinir dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan dan kajian di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tabunganen adalah :

- a. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang harus dilakukan rehab, karena bangunan yang ada adalah bangunan lama sejak tahun 80'an;
- b. Banyaknya kekosongan jabatan di Kecamatan Tabunganen mengakibatkan kurangnya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat;
- c. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perikanan dan wisata;
- e. Rendahnya kemampuan dan keterampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi
- f. Perlunya pengeraan dan pengaspalan jalan Kabupaten yang menghubungkan beberapa Desa;
- g. Iklim pasang surut air asin di musim kemarau;
- h. Kenakalan remaja dan pemakaian obat-obat terlarang dikalangan remaja;
- i. Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan berobat (SKTM).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah dan masyarakat harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah bersama masyarakat.

Titik Awal Rencana Strategis Pembangunan Daerah dimulai dari **Visi** yang menjadi kristalisasi komitmen bersama (seia sekata/selidah) dan merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam pewujudan hal tersebut kecamatan Tabunganen harus mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh Bupati terpilih Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 yang menjadi acuan dalam pola dan kerangka berpikir kecamatan dalam menentukan renstra.

Adapun untuk Visi dan Misi Bupati terpilih Kab. Batola Tahun 2017-2022 Adalah sebagai berikut :

VISI

Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera

MISI

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota.

2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.

3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.

4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani .

Berdasarkan visi dan misi diatas, terdapat beberapa kesinergian masing-masing SKPD dilingkup Kab. Batola untuk mewujudkannya, adapun untuk seluruh kecamatan diprioritaskan untuk memilih Misi program no 4 (Empat) yakni : “Memantapkan Tata Kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani.

Dengan mengacu pada batasan tersebut di atas “**Visi Kecamatan Tabunganen 2017-2022**” dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut :

“ TABUNGANEN CERIA”

Uraian penjelasan pernyataan Visi kecamatan tabunganen, adalah sebagai berikut :

a. Cepat

Kondisi masyarakat saat ini sekarang mengharapkan aparatur pemerintah dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk itu aparatur kecamatan tabunganen harusnya dapat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sigap dan cekatan sehingga penyelesaian urusan masyarakat dapat selesai dengan waktu yang tidak terlalu lama

b. Efektif dan efisien

aparatur kecamatan tabunganen dalam hal ini sudah melaksanakan tugas dan pokok fungsi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan selalu berpedoman dalam standar operasional prosedur pelayanan sehingga masyarakat dalam berurusan memang akan dilayani dengan semaksimal mungkin sehingga melancarkan masyarakat dalam berurusan administrasi di kecamatan tabunganen

c. Ramah

Masyarakat yang ingin berurusan di kecamatan tabunganen mempunyai macam- macam karakter sehingga aparatur kecamatan akan dituntut dapat melayani mereka dengan suasana yang kekeluargaan dan mengayomi sehingga mereka dapat terbantu . untuk itu pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai surat – surat yang akan sangat membantu dalam memberikan pelayanan

d. Inovatif

Seiring dengan kemajuan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi tentunya aparatur di kecamatan tabunganen dapat memberikan ide – ide kreatif bagaimana inovasi pelayanan di kecamatan sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya ide kreatif tersebut

e. Akuntabel

Pelayanan publik selama ini di kecamatan tabunganen berpedoman atau berkomitmen untuk keterbukaan atau akuntabel dalam hal ini tidak ada meminta tarif dari setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. .

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, dengan mengakomodasikan berbagai “ **input** ” dipadukan dinamika lingkungan sesuai tuntutan masyarakat dirumuskan “ **Misi** ” sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Tabunganen secara bertahap, sistematis dan terintegrasi. *Misi sebagai pernyataan cita-cita, memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.*

Mengacu pada visi Kecamatan Tabunganen dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Tabunganen ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
- b. Mewujudkan peningkatan tertib administrasi desa

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tabunganen

1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja dengan indikator tujuan

Indeks Kepuasan Masyarakat

- b. Meningkatkan Tertib administrasi Desa dengan inikator Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik.

2. Sasaran dan indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (*targetnya*) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Tabunganen periode 2017–2022 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator utama Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Pesentase Desa dengan Administrasi Desa yang baik

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tabunganen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan , Indikator dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tabunganen ESELON III

No.	Tujuan	Indikator	Formulasi perhitungan indikator tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi perhitungan indikator sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey IKM	75 %	77 %	77 %	80 %	80 %
2	Meningkatkan tertib administrasi desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Jumlah Desa dengan Administrasi Desa yang Baik / Jumlah Desa X 100 %	71,4%	71,4%	78,6%	78,6%	78,6%

TABEL 4.2

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN KECAMATAN TABUNGANEN TAHUN 2018- 2022

(PEJABAT ESELON IV)

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasan Masyarakat .	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	Jumlah pelayanan yang tepat waktu / jumlah pelayanan yang ditangani X 100 %	75	77	77	80	80
					Jumlah PMKS yang ditangani di Kecamatan	Realisasi / target X 100 %	0	0	5	5	6
					Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	Realisasi /Target x 100%	2	2	2	2	2

				Meningkatnya ketentraman dan Keteriban di Kecamatan Tabunganen	Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	Realisasi /Target x 100%	1	1	1	1	1
					Jumlah Poskamling yang aktif	Jumlah Poskamling yang aktif /Jumlah Poskamling yang terdata x 100%	75	77	77	80	80
				Meningkatnya Peran Serta Wanita DalamKesetaraan Gender	Jumlah Kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan Gender	Realisasi /Target x 100%	360	360	360	360	360
				Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Paskibra yang terlatih	Realisasi /Target x 100%	25	25	25	25	25

					Jumlah Peserta Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti	Realisasi /Target x 100%	0	0	10	10	10
					Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang di bina	Realisasi /Target x 100%	1	1	1	1	1
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan administrasi bidang Pemerintahan Desa yang baik	Realisasi /Target x 100%	10	11	12	13	14
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penyusunan APBDes	Jumlah Desa dengan Dokumen Perencanaan yang benar dan tepat waktu	Realisasi /Target x 100%	10	11	12	13	14

					Jumlah desa yang menyusun APBdesa dengan benar dan tepat waktu	Realisasi /Target x 100%	10	11	12	13	14
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	----	----	----	----	----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tabunganen. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tabunganen Tahun 2017–2022 sesuai dengan misi Kabupaten Barito Kuala disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)			
MISI : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani (4)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan sistem dan fasilitasi dalam pelayanan umum kepada Masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan public. - Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi lintas sector Kecamatan
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan fasilitasi yang ada di Kecamatan dalam Pengendalian dan pembinaan Desa di Kecamatan Tabunganen	- Peningkatan kemampuan aparat pemerintahan Desa. - Peningkatan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan.

. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

b. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tabunganen dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah
3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor kecamatan

Keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama, serta strategi dan arah kebijakan akan diuraikan pada tabel 5.1 pada lampiran ini

Tabel 5.2

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target dan Kinerja Kecamatan Tabunganen

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Target kinerja pada Tahun ke-				
							1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021
Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)	1. Mewujudkan peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1.Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	77	77	77	80	80
	2. Mewujudkan Peningkatan Tertib Administrasi Desa	2.Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	2. 1.Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Persentase	0	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4

Tabel 5.3

TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TABUNGANEN 2017 – 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PREOGRAM	KONDISI AWAL	TARGET				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Kepuasan Masyarakat .	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat .	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1. Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	-	75	77	77	80	80
					2. Jumlah PMKS yang ditangani di kecamatan	-	0	5	6	6	6
					3. Jumlah kelompok wanita yang aktif dalam kesetaraan gender	-	360	360	360	360	360

					4. Jumlah penegakan Perda yang dilaksanakan	0	1	1	1	1	1
					5. Jumlah lembaga ekonomi desa yang dibina	0	1	1	1	1	1
					6. Jumlah organisasi kemasyarakatan di kecamatan yang dibina	0	35	35	35	35	35
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan Administra si yang benar dan tepat waktu	Meningkatny a Kualitas Administrasi Pemerintah n Desa.	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan dan Administrasi desa yang baik.	Meningkatkan kualitas administrasi desa	2. Jumlah desa dengan dokumen perencanaan dan administrasi pemerintahan desa yang baik	0	14	14	14	14	14

					.						
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa.	Persentase Desa dengan Administrasi desa yang baik.	Meningkatkan kualitas administrasi desa	1. Jumlah desa yang dimonitoring dengan administrasi pemerintahan desa yang baik	0	14	14	14	14	14
				Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penyusunan APBDes	2. Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	0	1	1	1	1	1
					3. Jumlah desa yang menyusun APBdesa dengan dan	0	14	14	14	14	14

					tepat waktu						
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Program SKPD Kecamatan Tabunganen merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tabunganen selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program SKPD Kecamatan Tabunganen untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja SKPD Kecamatan Tabunganen berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (output). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Tabunganen disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (output).

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola SKPD Kecamatan Tabunganen. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh SKPD Kecamatan yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Batola. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif SKPD Kecamatan Tabunganen. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tabunganen disajikan dalam Tabel 6.1 (Tabel T.C 27)

Tabel 6.1 (TC-27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tabunganen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja, Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun – 1 (2018)		Tahun – 2 (2019)		Tahun – 3 (2020)		Tahun – 4 (2021)		Tahun – 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.19.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Penegakan Perda yang dilaksanakan (%)	12	12	14.100.000	12	16.800.000	12	16.800.000	12	16.800.000	12	16.800.000	144	81.300.000		
		4.01.19.15.08	Koordinasi penanganan dan gangguan keamanan dagri (kali)		12	12	14.100.000	12	16.800.000	12	16.800.000	12	16.800.000	12	16.800.000	144	81.300.000	Kasi Trantib	Kec. Tabungaenen
		4.01.19.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Desa dengan Administarsi desa yang baik dan Jumlah organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	25 org	25	18.800.000	25	18.800.000	25	18.800.000	25	18.800.000	25	18.800.000	125	94.000.000		
		4.01.19.16.11	Pelaksanaan pelatihan paskibra dan upacara 17 agt (orang)	jumlah anggota paskibraka tingkat kecamatan(Orang)	25 org	25	18.800.000	25	18.800.000	25	18.800.000	25	18.800.000	25	18.800.000	125	94.000.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Tabungaenen
		4.01.19.16.13	Penyelenggaraan /Pengiriman peserta atak diang ke Kabupaten	Jumlah Pemuda yang dikirim	2 org	2						2	3.200.000	2	3.200.000	4	6.400.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Tabungaenen

		4.01.19.17	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah produk unggulan yang berpotensi dikembangkan (jenis)		1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	12.500.000		
		4.01.19.17	Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah (kali)	Jumlah Keikutsertaan dalam kegiatan pameran		1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	5	12.500.000	Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Tabungaenen
		4.01.19.18	Program Peningkatan peran serta & kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah kelompok Wanita yang aktif dalam Kesetaraan Gender	360	180	6.350.000	360	16.300.000	360	16.300.000	360	16.300.000	360	16.300.000	1.620	71.550.000		
		4.01.19.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (kali)	Jumlah ibu - ibu rumah tangga yang tersuluh (orang)	360	180	6.350.000	360	16.300.000	3604	16.300.000	360	16.300.000	360	16.300.000	1.620	71.550.000	Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Tabungaenen
		4.01.19.19	Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	Jumlah Organisasi kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	35	35	28.875.000	35	25.700.000	35	25.700.000	35	25.700.000	35	25.700.000	175	131.675.000		
		4.01.19.19.01	MTQ tingkat Kabupaten (orang)	Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim pada MTQ Tingkat kabupaten (orang)	35	35	28.875.000	35	25.700.000	35	25.700.000	35	25.700.000	35	25.700.000	175	131.675.000	Kasi Kesra & Pelayanan	Kec. Tabungaenen
Meningkatkan Tertib administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi	4.01.19.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah Desa yang menyusun APBDes	14	14	12.990.000	14	24.510.000	14	24.510.000	14	24.510.000	14	24.510.000	56	111.030.000		

	Pemerintah Desa			dengan baik dan tepat waktu															
			Evaluasi dan rancangan peraturan desa ttg APBDes (dokumen)	jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat (dokumen)	14	14	1.630.000	14	7.710.000	14	7.710.000	14	7.710.000	14	7.710.000	14	32.470.000	Kasi Pemberdayaan Masy	Kec. Tabungaenen
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes (laporan)	jumlah desa yang dimonitor dan di evaluasi (desa)	14	14	11.360.000	14	16.800.000	14	16.800.000	14	16.800.000	14	16.800.000	14	78.560.000	Kasi Pemberdayaan Masy	Kec. Tabungaenen
Meningkatkan Tertib administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	4.01.19.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	1	1	4.900.000	1	4.050.000	1	4.050.000	1	4.050.000	1	4.050.000	5	21.100.000		
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (kali)		1	1	4.900.000	1	4.050.000	1	4.050.000	1	4.050.000	1	4.050.000	5	21.100.000	Kasi Pemberdayaan Masy	Kec. Tabungaenen
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.09.01	Program Pelayanan adm. Perkantoran	Persentase Penyediaan pelayanan sarana administrasi Perkantoran															
		4.01.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lembar)	Jumlah surat yang dikirim & diterima(lembar)	170	170	765.000	170	765.000	170	775.000	170	785.000	170	795.000	850	3.885.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SD air & listrik (tahun)	Jumlah Tagihan listrik dan air yang dibayarkan (bulan)	12	12	2.220.000	12	2.220.000	12	2.220.000	12	2.220.000	12	2.220.000	60	11.100.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.01.06	Penyediaan Jasa pemeliharaan/	Jumlah	8	8	2.035.000	8	1.840.000	8	1.850.000	8	1.860.000	8	1.870.000	40	9.455.000	Sekcam	Kec.

			perizinan kendaraan dinas/ operasional (unit)	kendaraan yang dibayarkan pajaknya (unit)														Tabungaenen	
	4.01.09.01.08	-	Penyediaan Jasa kebersihn kantor (oh)	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar (OH)		252	11.734.500	252	11.734.500	252	11.744.500	252	11.754.500	252	11.764.500	1.260	58.822.500	Sekcam	Kec. Tabungaenen
	4.01.09.01.10	-	Penyediaan atk (buah)	jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	20	20	10.144.550	20	7.254.550	20	7.254.550	20	7.260.550	20	7.265.550	100	36.327.750	Sekcam	Kec. Tabungaenen
	4.01.09.01.11	-	Penyediaan barang cetakan & penggandaan (buku)	jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)	30	30	2.050.000	30	2.060.000	30	2.070.000	30	2.080.00	30	2.090.000	150	10.400.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
	4.01.09.01.12	-	Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kntr (jenis)	jumlah perlengkapan instalasi listrik (buah)	4	4	1.156.550	4	928.550	4	928.550	4	938.550	4	938.550	20	4.692.705	Sekcam	Kec. Tabungaenen
	4.01.09.01.15	-	Penyediaan bahan bacaan & perpu (skn)	Jumlah langganan koran dan Peraturan Perundang- undangan (skn)	1	1	1.140.000	1	1.080.000	1	1.080.000	1	1.080.000	1	1.080.000	5	5.400.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
	4.01.09.01.17	-	Penyediaan makan & minum (porsi)	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	4598	4598	28.836.500	4598	33.466.500	4598	34.467.500	4598	35.468.500	4598	36.469.500	22.99 0	172.337.50 0	Sekcam	Kec. Tabungaenen
	4.01.09.01.18	-	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (oh)	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi dan studi banding	12	12	31.928.000	12	24.600.000	12	24.600.000	12	24.650.000	12	24.700.000	60	123.000.00 0	Sekcam	Kec. Tabungaenen

				keluar daerah dalam provinsi (OK)															
		4.01.09.01.20	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dlm daerah (oh)	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi ke dalam daerah dan pembinaan ke desa (OH)	516	516	33.780.000	516	33.720.000	516	33.720.000	516	33.725.000	516	33.730.000	2.580	168.600.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.01.09.02	Program Peningkatan Sarpras Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU															
		4.01.09.02.01	Pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	Jumlah peralatan kantor	11	4	9.250.000	-	-	4	8.000.000	3	11.700.000	-	-	11	28.950.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4	-	-	-	-	4	10.000.000	-	-	-	-	4	10.000.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.04	Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas (unit)	Jumlah peralatan rumah jabatam/dinas	4	-	-	-	-	-	-	4	10.000.000	-	-	4	10.000.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.05	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas (unit)	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	4	-	-	-	-	-	-	4	10.000.000	-	-	4	10.000.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.06	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (oh)	Jumlah pemeliharaan rutin berkala	365	365	42.925.000	365	13.025.000	365	13.025.000	365	13.025.000	365	13.025.000	1825	94.395.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.07	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas (unit)	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1	-	-	1	12.000.000	1	10.400.000	-	-	1	11.600.000	1	34.000.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.08	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas (unit)	Jumlah pemeliharaan	8	8	23.216.000	8	13.186.000	8	13.187.000	8	13.188.000	8	13.189.000	40	75.964.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen

				/berkala kendaraan dinas															
		4.01.09.02.09	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor (kali)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	50	7.500.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.11	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional (unit)	Jumlah kendaraan dinas /operasioanl	4		-	1	23.400.000	1	23.400.000	1	23.400.000	1	23.400.000	4	93.600.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
		4.01.09.02.15	Pengadaan meubelair (unit)	Jumlah mebeleur	22		-	6	13.400.000	4	7.000.000	6	13.700.000	6	13.800.000	22	47.900.000	Sekcam	Kec. Tabungaenen
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatn ya kualitas pelayanan publik	4.01.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang yg mengikuti diklat/bintek															
		4.01.09.05.03	Bimbingan teknis implementasi perpu (ok)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (OK)	6	2	22.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	6		Sekcam	Kec. Tabungaenen

Table 6.2 Misi, sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan dan pendanaan indikatif

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KERJA KECAMATAN	PENDANAAN INDIKATIF
Mewujudkan Peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Program Pelayanan administrasi perkantoran b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur c. Program Peningkatan Pelayanan Publik	-
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	APBD Kab
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	APBD Kab
			Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	APBD Kab

			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	APBD Kab
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang Baik	Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan daerah	APBD Kab
		Meningkatnya kualitas Laporan dan administrasi desa dengan baik	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	APBD Kab

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Indikator kinerja SOPD Kecamatan Tabunganen adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD Kecamatan dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Secara rinci indikator kinerja SOPD Kecamatan Tabunganen ditampilkan dalam Tabe TC - 28 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 %	75 %	77 %	77 %	80 %	80 %	80 %
2.	Persentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	71,4%	71,4%	71,4%	78,6%	78,6%	78,6%	78,6%

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tabunganen sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka rencana strategis Kecamatan Tabunganen merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Visi Kecamatan Tabunganen sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan, serta masyarakat di Kecamatan Tabunganen.

Rencana strategis Kecamatan Tabunganen akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Tabunganen.